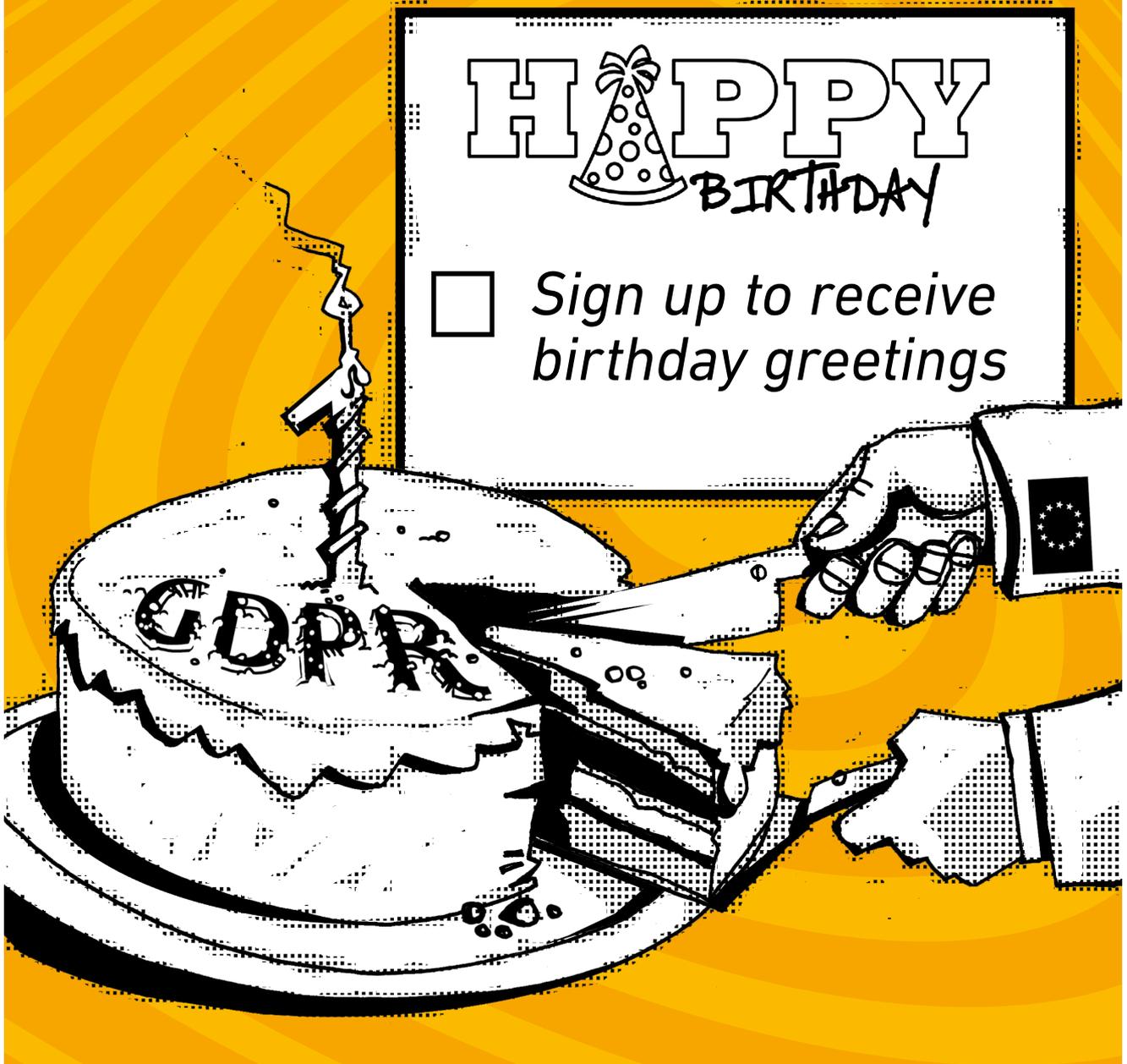


GDPR: Setelah setahun berjalan



TREN DI BULAN MEI

Perlawanan terhadap konten kekerasan ekstrem kembali menjadi pusat perhatian. Teknologi pengenalan wajah menimbulkan kekhawatiran.

[Lebih lanjut di halaman 2](#)

FOKUS: HUAWEI

Perintah Eksekutif oleh Presiden Amerika Serikat berdampak langsung pada Huawei dan bisa menimbulkan dampak lebih luas.

[Lebih lanjut di halaman 6](#)

ROBOT DAN ORANG TUA

Dunia yang semakin tua menimbulkan tantangan terhadap ekonomi dan masyarakat. Bisakah robot membantu?

[Lebih lanjut di halaman 7](#)

ANALISIS DATA: GDPR

Apa yang telah terjadi sejak Peraturan Perlindungan Data Uni Eropa (GDPR) dilaksanakan pada Mei 2018?

[Lebih lanjut di halaman 8-9](#)

Tren Kebijakan Digital di Bulan Mei

Setiap bulan, kami menganalisis ratusan perkembangan kebijakan digital untuk mengidentifikasi tren utama serta mengungkap penyebabnya. Berikut adalah tren utama bulan ini.

1. Kontroversi Huawei berlanjut terus

April lalu, kami menuliskan kontroversi seputar produk Huawei dan bagaimana mereka dianggap mengancam keamanan nasional oleh beberapa negara. Beberapa perkembangan masih berlangsung sampai sekarang dengan Huawei sebagai berita utama.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang 'semua perolehan, impor, transfer, instalasi, berurusan dengan, atau penggunaan teknologi oleh individu dalam yurisdiksi Amerika Serikat, yang transaksinya mengikutsertakan entitas 'dimiliki, dikontrol, atau menjadi subyek terkait dengan musuh luar negeri' dan berisiko terhadap keamanan Amerika. Dalam praktiknya, keputusan ini melarang ekspor teknologi Amerika (termasuk hak cipta, kecuali izin khusus dari Kementerian Perdagangan). Pelarangan ini tidak berpengaruh pada produk atau perangkat lunak saat ini, tetapi akan berdampak pada perkembangan dan inovasi selanjutnya.

Kementerian Perdagangan menambahkan perusahaan itu ke daftar entitas – daftar hitam perusahaan yang dilarang bekerja sama dengan Amerika, kecuali dengan persetujuan pemerintah.

Segera setelah keputusan itu diluncurkan, beberapa perusahaan termasuk Google, Intel dan Qualcomm langsung mengumumkan mereka tidak lagi menjual teknologinya ke Huawei. Apa artinya untuk perusahaan di Cina?

Dalam jangka pendek, dampaknya akan terbatas. Dalam jangka menengah, Huawei akan kesulitan membangun komponen perangkat lunak dan keras sendiri karena tidak lagi bisa mengimpor. Namun, dalam jangka panjang, jika berhasil membangun pengetahuannya sendiri, perusahaan itu akan mendapatkan tempat lebih di pasar global. Selain Huawei, keputusan untuk memotong kerja sama dengan raksasa teknologi Cina akan berdampak ke perusahaan teknologi Amerika Serikat, ekonomi Amerika secara luas dan bahkan inovasi teknologi global. Kami menganalisis hal ini lebih detil di halaman 6.

2. Christchurch Call: Menghapus konten kekerasan ekstrem secara daring

Maret 2019, serangan teror ke dua masjid di Christchurch, Selandia Baru disiarkan secara langsung selama 17

menit. Meskipun sepertinya pendek, tapi konten kekerasan daring menyebar sangat cepat dan menunjukkan sekali lagi bahwa reaksi cepat untuk segera menurunkannya teramat penting. Dua bulan kemudian, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan Presiden Perancis Emmanuel Macron meluncurkan Christchurch Call untuk menghapus konten teroris dan kekerasan ekstrem secara daring.

Didukung 18 negara dan banyak perusahaan teknologi, *Christchurch Call* menggarisbawahi komitmen sukarela untuk mencegah penyebaran konten ilegal. Amerika tidak mendukung hal ini karena kekhawatiran atas kebebasan berbicara. Cina, Rusia dan negara-negara Timur Tengah juga tidak ikut menandatangani. Kemungkinan karena mereka lebih nyaman dengan kerja sama multilateral untuk menyelesaikan isu seperti ini.

Apa yang penting di sini? Pertama, panggilan ini tidak lagi hanya fokus di Facebook, Google dan Twitter tapi juga ke penyelenggara jasa daring lain yang juga terkait dengan yurisdiksi nasional. Jadi, tidak hanya negosiasi panjang dengan perusahaan teknologi besar, pemerintah bisa meminta penyelenggara jasa Internet (ISP), misalnya untuk memblokir akses ke konten ilegal. Pesan di sini sangat jelas: pemerintah sudah kehabisan kesabaran dan saatnya untuk regulasi yang lebih bergigi. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan digital di area lain seperti perpajakan daring dan e-dagang.

Kedua, panggilan ini juga mencari solusi jangka panjang, seperti pendidikan dan pembangunan kapasitas, literasi media dan riset untuk solusi teknologi lainnya. Namun, ada beberapa hal yang harus ditangani terlebih dulu. Misalnya: apa itu "kekerasan ekstrem"? Jawaban terhadap pertanyaan ini menjadi tantangan penting yang sudah lama ada dan harus ditangani saat ini juga. *Christchurch Call* ini juga mempromosikan solusi teknologi lainnya. Bisakah kita menggantungkan diri pada teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) untuk menapis konten kekerasan kalau kita belum memiliki definisi yang sama soal apa itu kekerasan ekstrem? Bagaimana dengan risiko keputusan yang salah oleh algoritma?

Ketiga, *Christchurch Call* juga berbicara tentang perlunya tindakan segera dan efektif untuk mitigasi penyebaran konten ekstrimis. Ada diskusi berkembang dalam beberapa kerangka kerja seperti Parlemen Eropa dan G7, tentang permintaan ke perusahaan Internet untuk menghapus materi dalam satu jam setelah diidentifikasi. Namun, melihat serangan ke Christchurch, apakah satu jam itu cukup?

Lebih dari *Christchurch Call*, Digital Charter dari Kanada juga menangani ucapan kebencian secara daring dan konten ekstrim. [Justin Trudeau](#) Perdana Menteri Kanada mengatakan bahwa 'platform media sosial juga harus bertanggung jawab atas ujaran kebencian dan disinformasi yang kita lihat secara daring. Bila mereka tidak segera bertindak, maka akan ada konsekuensi.'

Kedua inisiatif ini merefleksikan tekanan secara terus menerus dari pemerintah untuk kebijakan lebih kuat untuk memastikan para platform agar menindak secara serius penyebaran konten ilegal. Pertemuan G7 Agustus 2019 diharapkan mendiskusikan hal ini juga.

3. Teknologi pengenalan wajah menimbulkan kekhawatiran

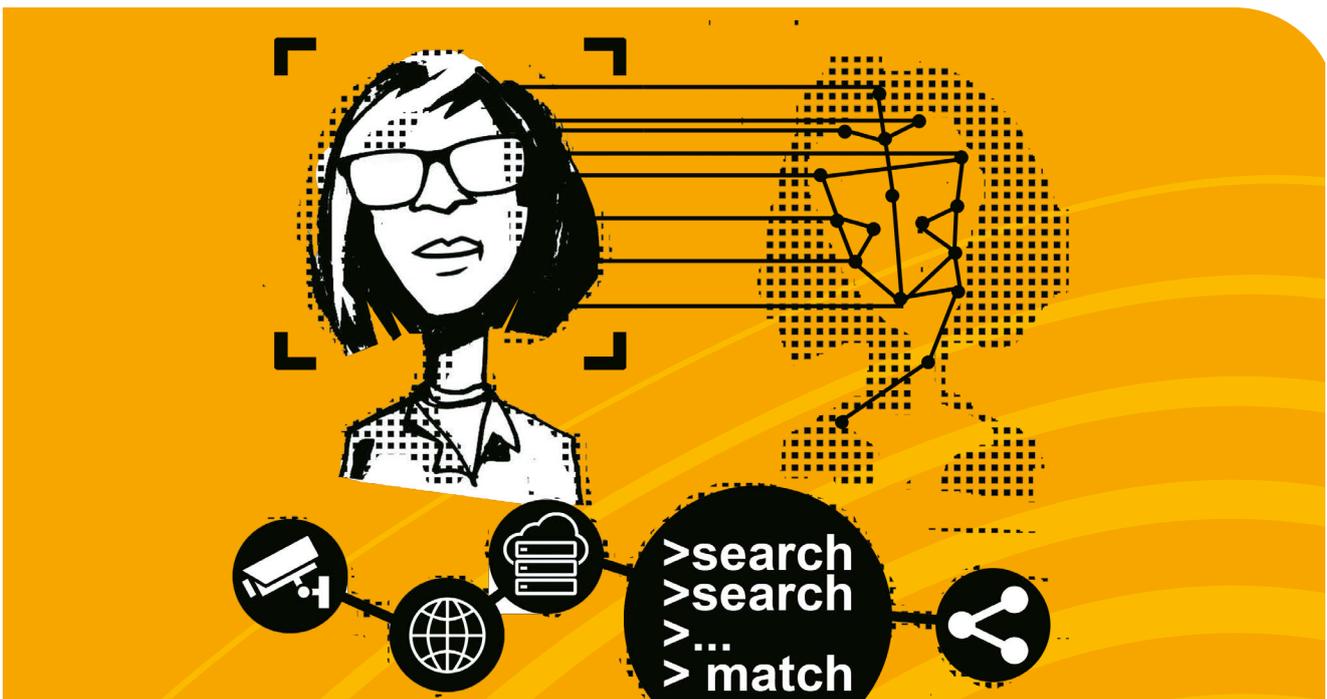
Penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh otoritas publik tetap menjadi kontroversi, terutama potensi konsekuensi negatif atas hak asasi manusia. Kekhawatiran tersebut muncul di San Fransisco. Bulan ini, Dewan Pengawas kota mengadopsi peraturan anti pengawasan termasuk di antaranya pelarangan penggunaan alat pengenalan wajah oleh polisi dan departemen kota lainnya.

Pelarangan ini terkait erat dengan pertimbangan hak asasi manusia. Penggunaan alat pengenalan wajah oleh apabila aparat penegak hukum bisa memicu keputusan yang bias dan diskriminasi, termasuk potensi salah penahanan. Seperti dijelaskan Microsoft April lalu , ketika memutuskan tidak menjual teknologi ini

di California, karena kaum minoritas dan perempuan punya kecenderungan ditarget secara tidak proporsional. Algoritma yang digunakan rata-rata dilatih mengenali wajah laki-laki dan kulit putih, seperti studi Massachusetts Institute of Technology dan Stanford University. Lebih jauh lagi, teknologi pengenalan wajah bisa digunakan untuk alat pengawasan massal yang merusak hak atas privasi.

San Fransisco adalah kota pertama yang menjalankan pelarangan teknologi pengenalan wajah ini, tapi kita mungkin akan melihat yang lain menjalani proses sama. Amerika bukanlah satu-satunya negara di mana teknologi ini dicermati dengan kekhawatiran. Di Inggris, seorang pekerja yang yakin gambarnya diambil polisi melalui kamera di jalan melayangkan tuntutan hukum. Dia berargumen bahwa wajahnya dipindai di ruang publik tanpa persetujuan serta kecurigaan bahwa dia melakukan kesalahan. Dia menganggap hak privasinya telah dilanggar. Polisi berargumen tidak ada pelanggaran privasi yang mereka lakukan.

Bagaimana perusahaan teknologi memposisikan diri dalam debat pengenalan wajah serta hak asasi manusia ini? Microsoft telah mengulang permintaannya agar ada regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi itu. Google juga berkomitmen pada Desember 2018 untuk tidak menjual teknologi pengenalan wajah secara umum sebelum menjawab 'pertanyaan penting di teknologi dan kebijakan'. Di sisi lain, para pemilik saham Amazon, menolak dua proposal yang melarang penjualan teknologi wajah ke pemerintah.



Perkembangan kebijakan digital bulan Mei

Dengan begitu banyak perkembangan tiap minggu, lingkungan kebijakan selalu penuh dengan inisiatif baru, kerangka peraturan yang terus berkembang, kasus dan keputusan hukum baru serta situasi geopolitik yang sangat kaya.

Melalui observatorium *Digital Watch*, kami mengurai isi perkembangan tersebut, memberi konteks, menganalisis semuanya dan mempresentasikannya dalam format mudah dibaca. Barometer ini mengikuti dan membandingkannya dengan tren terbaru, lalu mengukurnya dibanding isu bulan sebelumnya. Halaman ini adalah versi ringkasan. Baca lanjutannya di masing-masing ikon warna biru, atau mengunjungi bagian updates di observatorium.[🔗](#)



relevansi tetap

Arsitektur Tata Kelola Internet Global

50th World Telecommunication and Information Society Day menekankan pentingnya peningkatan peran dan partisipasi negara berkembang dalam proses pembuatan standar di ITU.[🔗](#)



relevansi tetap

Pembangunan Berkelanjutan

Dalam sesi tahunan ke-22, Komisi PBB untuk Perkembangan Sains dan Teknologi (UNCTSD) mendiskusikan dampak perkembangan teknologi yang begitu cepat untuk pembangunan berkelanjutan.[🔗](#)

Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) membangun kerangka kerja untuk menilai apakah kebijakan teknologi, sains dan inovasi berjalan searah dengan tujuan pembangunan.[🔗](#)

Selandia Baru mengeluarkan Rencana Aksi untuk meningkatkan inklusifitas digital nasional.[🔗](#)



relevansi meningkat

Keamanan

Pemerintah AS mengeluarkan Perintah Eksekutif terkait keamanan teknologi informasi dan komunikasi serta rantai dagang layanan yang terkait dengan Huawei.[🔗](#)

Perancis dan Selandia Baru menginisiasi Christchurch Call to Action untuk menghapus konten ekstrimis secara daring.[🔗](#) Kanada meluncurkan Piagam Digital yang mempromosikan rasa percaya di ranah digital.[🔗](#)

Singapura baru mengesahkan Undang-undang yang mengkriminalisasi publikasi berita bohong.[🔗](#)

WhatsApp terkena serangan dengan keharusan memasang malware pengawasan di telepon genggam.[🔗](#) Dewan Uni Eropa mengadopsi keputusan yang memungkinkan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi yang merespon ke serangan siber.[🔗](#)



relevansi meningkat

E-dagang dan ekonomi Internet

Jaksa Umum Pengadilan Uni Eropa (CJEU) berpendapat bahwa Airbnb adalah layanan masyarakat informasi.[🔗](#)

Supir Uber di beberapa kota di dunia memprotes kondisi kerja serta pembayaran di Uber.[🔗](#) Dewan Hubungan Tenaga Kerja AS memutuskan bahwa supir Uber adalah kontraktor independen.[🔗](#)

Facebook mengumumkan rencana mengeluarkan mata uang kripto untuk pembayaran digital di 2020.[🔗](#)

Kenya mengeluarkan Cetak Biru Ekonomi Digital dengan rangkaian proposal yang mendukung perkembangan ekonomi nasional Kenya.[🔗](#)



relevansi meningkat

Hak Digital

Komisi Perlindungan Data Irlandia memulai investigasi ke raksasa agen periklanan Quantcast [dan](#) iklan personalisasi dari Google [karena](#) dianggap melanggar Peraturan Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa.

Satu tahun setelah GDPR dilaksanakan, Anggota Komisi Uni Eropa, Vera Jourová meminta semua negara bagian untuk menghormati makna dan spirit dari peraturan itu. [dan](#)

Menteri Kehakiman AS mendakwa Julian Assange dengan 17 kasus pelanggaran UU Spionase AS. [dan](#)



relevansi tetap

Yurisdiksi dan Hukum

Seorang pekerja di Australia memenangkan kasus penting melawan majikannya, setelah dia menolak memberikan sidik jarinya untuk absen di kantor. [dan](#)

Komisi Dagang Federal AS menunda keputusannya senilai miliaran USD terkait pelanggaran privasi yang dilakukan Facebook. [dan](#)



relevansi tetap

Infrastruktur

Keputusan ICANN [meneruskan](#) pendaftaran domain .amazon mendapatkan kecaman dari Peru, Kolombia, Ekuador dan Bolivia. [dan](#)

Huawei akan berinvestasi \$100 juta dalam pengembangan infrastruktur *cloud* di Chili. [dan](#)

SpaceX meluncurkan satelit Starlink pertamanya, sebagai salah satu rencana untuk menyediakan akses pita lebar yang terjangkau di seluruh dunia. [dan](#)



relevansi menurun

Netralitas Jaringan

Dalam surat yang dilayangkan ke pejabat Uni Eropa, beberapa organisasi, perusahaan dan individu mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak dari teknologi inspeksi paket mendalam (*Deep Packet Inspection*) yang digunakan penyedia layanan Internet terhadap netralitas jaringan. [dan](#)



relevansi meningkat

Teknologi Baru (IoT, AI, dll.)

San Francisco melarang polisi dan departemen lainnya untuk menggunakan teknologi pengenalan wajah. [dan](#) Pekerja di Inggris yang yakin gambar dirinya diambil oleh polisi melalui kamera di jalanan menuntut secara hukum; untuk melawan penggunaan teknologi tersebut. [dan](#)

UNESCO melansir rekomendasi untuk memerangi bias gender dalam aplikasi AI. [dan](#) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengadopsi Rekomendasi untuk AI [yang](#) berisi prinsip-prinsip pengembangan AI yang bertanggung jawab serta bisa dipercaya.

Pemerintah Inggris memulai konsultasi publik tentang persyaratan keamanan untuk konsumen terkait produk-produk *Internet of Things*. [dan](#)

Republik Ceko mengadopsi Strategi Nasional terkait AI, [dan](#) sementara itu Inggris menunjuk Dewan AI dari Pemangku Kepentingan Majemuk untuk perkembangan AI. [dan](#)

Institusi-institusi dan perusahaan di Cina meluncurkan *Beijing AI Principles* untuk mengarahkan pembangunan dan penggunaan AI yang baik. [dan](#)

Kontroversi Huawei: Melampaui Rubicon?

Perintah Eksekutif terakhir yang ditandatangani Presiden Trump Mei lalu menambahkan dimensi baru dalam kontroversi Huawei. Beberapa perusahaan Amerika menaati keputusan itu dan segera mengumumkan tidak bisa bekerja sama lagi dengan Huawei. Apa artinya ini bagi Huawei, industri teknologi di Amerika Serikat dan pasar global?

Serangan pertama: OS Android milik Google

Tidak lama setelah keputusan itu diluncurkan, Google mencabut izin Huawei yang menggunakan sistem operasi berlisensi mereka, Android, di semua gawai Huawei. Keputusan ini tidak sepenuhnya mempengaruhi pasar Cina karena di sana sistem operasi yang dipakai Huawei adalah sistem terbuka (*open source*) dari Android. Dampak lebih besar terasa pada pasar Huawei terutama di Eropa dan Amerika, karena gawai Huawei di sana banyak tergantung pada sistem berlisensi dari Google dan banyak konsumen tergantung pada aplikasi berlisensi Google (seperti Google Play, Google Maps, Gmail dan Google Docs).

Dalam jangka pendek, pengguna Huawei masih memiliki akses ke layanan Android. Namun, dalam jangka panjang, jika perusahaan membangun sendiri OS dan produknya, pengguna baru terutama di negara berkembang, terutama Asia dan Afrika, mungkin akan lebih memilih penggunaan gawai Huawei yang lebih terjangkau dengan OS baru.

Serangan kedua: Intel, Qualcomm, dan desain cip Broadcom

Setelah Google, para perancang cip seperti Intel, Qualcomm, dan Broadcom –di mana *server*, prosesor, modem dan *switch chip* Huawei sangat bergantung– ikut serta melarang Huawei. Huawei mungkin tidak terlalu bermasalah dalam jangka pendek karena masih ada stok untuk cip dan prosesor, tetapi perusahaan itu perlu berjuang untuk membangun cipnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi keuntungan untuk Huawei. Dia bisa merancang sendiri cip yang digunakan dan bisa mengamankan dominasi mereka di pasar telekomunikasi dan perangkat bergerak di masa depan.

Serangan ketiga: ARM chip logic

Berita paling mengancam Huawei datang dari ARM, perusahaan berbasis di Inggris yang dimiliki SoftBank Corp dari Jepang. ARM adalah perancang arsitektur logika yang unik di hampir semua cip di seluruh dunia. ARM secara ekstensif menggunakan hak cipta dari institusi riset AS, yang oleh karena itu pelarangan ini berlaku.

HiSilicon, anak perusahaan Huawei, telah memproduksi cip berbasis ARM bertahun-tahun. Walaupun HiSilicon

mampu merancang sendiri cip mereka, hampir tidak mungkin –paling tidak untuk beberapa tahun– merancang inti logika mereka sendiri.

Pertanyaan lanjutan

Apa kerugian Google, Intel, Qualcomm, ARM dan lainnya setelah menutup kerja sama dengan Huawei, salah satu vendor teknologi komunikasi dan informasi terkemuka di dunia? Apakah para pengguna beralih ke sumber terbuka, dan melawan ke industri perangkat lunak (terutama dari Amerika) lainnya? Dan apakah AS melanggar Rubicon inovasi teknologi global? Semuanya menjadi pertanyaan terbuka.

Kemajuan pembuatan cip beberapa dekade terakhir dimungkinkan karena keterkaitan riset dan pembangunan: kerja sama antar para periset (dan entitas terkait lainnya) di seluruh dunia yang fokus pada inovasi tertentu, lalu berkolaborasi untuk membuat hal lebih baik bersama-sama. Keputusan AS membuat banyak perusahaan (dan negara) sadar bahwa ada hubungan nyata antara keputusan politik dengan rantai pasokan industri teknologi. Perang dagang teknologi akan mendorong negara untuk berinvestasi pada kapasitas mereka sendiri dan mengubah ketergantungan teknologinya dengan independensi teknologi. Perkembangan teknologi yang terpecah-pecah itu akan berakibat pada melambatnya inovasi di bidang ini.

Masih ada harapan bahwa situasi saat ini hanyalah krisis sementara, dalam konteks negosiasi dagang Cina dan Amerika Serikat (yang saat ini sedang menemui jalan buntu). Kita mungkin akan melihat pembalasan Huawei dan Cina dalam bentuk berbeda, dan perang dominasi global akan terus ada.



Kredit: Kärtis Dambrāns

AI dan Robotika: Solusi untuk bumi yang makin tua?

Populasi di bumi saat ini sudah semakin tua. Menurut PBB, populasi dengan umur di atas 60 tumbuh lebih besar daripada kelompok lebih muda, dengan pertumbuhan sekitar 3% per tahun secara global. Populasi yang semakin menua ini memiliki tantangan cukup signifikan di ekonomi dan masyarakat. Namun, robotika, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI) bisa memberikan beberapa solusi.

Robot: obat mujarab untuk mereka yang berusia tua?

Artikel The Economist baru-baru ini mengungkap argumen bahwa kehadiran robot bukanlah untuk mengambil alih pekerjaan manusia (seperti banyaknya klaim yang ada), tetapi akan membantu dunia untuk beradaptasi dengan kehadiran populasi yang semakin menua.

Karena rata-rata kelahiran di seluruh dunia menurun drastis, populasi manusia bekerja pun sama. Hal ini berdampak negatif terhadap kemajuan ekonomi. Ketika makin sedikit orang yang bekerja, memastikan produktivitas dan produk domestik bruto (PDP) justru membutuhkan tenaga kerja yang sangat produktif. Ini adalah tantangan yang bisa dijawab oleh robotika dan otomatisasi. Mesin berbasis AI akan membantu tenaga kerja yang semakin menua agar berfungsi maksimal. Dan semakin banyak orang pensiun, mesin-mesin ini bisa mengambil alih tugas mereka, memastikan produktivitas tidak menurun.

Keberadaan robot bisa berarti meningkatnya produktivitas dan kesempatan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi. Riset McKinsey mendukung klaim ini, memperkirakan bahwa otomatisasi bisa meningkatkan produktivitas global antara 0,8%–1,4% per tahun.

Demikian pula dengan keberadaan populasi orang tua ini, jenis layanan akan lebih spesifik mulai dari layanan medis dan pengasuhan sampai perumahan dan transportasi. Industri robotika sudah mulai bekerja untuk merespon permintaan ini. Jadi, dengan sulitnya mencari pengasuh dan jenis layanan yang mendukung populasi orang tua, layanan robot bisa menjadi solusi.

Saat ini, layanan robot terdiri dari mesin yang bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sampai ke robot yang bisa menemani, seperti Zora dan Buddy, dan robot-suster yang membantu mengawasi kondisi kesehatan seseorang. Namun, teknologinya belum cukup maju untuk memungkinkan robot berperan sebagai pengasuh penuh. Misalnya, robot-robot ini baru bisa mengerjakan tugas spesifik dan belum bisa terlibat dalam percakapan mendalam. Hal ini mungkin bisa dengan cepat berubah, karena semakin banyak perusahaan dan investor yang menunjukkan ketertarikan di bidang ini.

Populasi yang semakin menua dan investasi AI

The Economist juga melihat banyak negara dengan populasi semakin menua melakukan investasi di robotika dan otomatisasi. Mereka menuliskan bahwa Korea Selatan, Singapura, Jerman dan Jepang melibatkan robot lebih banyak di pekerjaan bentuk industri. Mereka juga negara-negara dengan tenaga kerja paling tua.

Apakah karena negara-negara itu sadar bahwa otomatisasi dan robotika membantu mereka produktif di masa akan datang, ketika tenaga kerja manusia mereka jauh berkurang? Sulit disimpulkan, tetapi menarik melihat angkanya. PwC memperkirakan kemajuan AI akan menambah angka PDP global sampai 14% di tahun 2030, dengan Amerika Utara dan Cina sebagai negara yang paling banyak untung, lalu Eropa. Sementara Amerika Latin dan Afrika mungkin akan mengalami keuntungan lebih sedikit.

Lalu, badan populasi di PBB memperkirakan di tahun 2030 akan ada penurunan drastis untuk usia 16 – 64 tahun di Eropa dan Amerika Utara, sementara kurva yang cukup stabil di Latin Amerika dan meningkat di Afrika. Jadi, artikel The Economist mungkin ada benarnya, memperlihatkan adanya korelasi antara tren demografi dengan investasi di robotika dan AI.

Kendati ada korelasi, tidak berarti ada relasi sebab akibat secara langsung dan apakah populasi yang semakin menua ini adalah dorongan utama untuk investasi di AI. Studi di masa depan akan lebih banyak bisa mengungkap hal ini dan banyak negara akan lebih bisa menjawab tantangan atas populasi yang menua apabila mau memberi perhatian lebih.



GDPR: Setelah satu tahun berjalan

Mei 2019, Peraturan Perlindungan Data Uni Eropa (GDPR) tepat berusia satu tahun. Dibuat untuk memperbarui peraturan perlindungan data di Uni Eropa, GDPR telah menjadi kata kunci dalam kebijakan digital sejak 2018, sebagian besar karena jangkauannya yang global serta dampaknya pada negara, bisnis dan warga negara di seluruh dunia.

Dalam setahun terakhir, kita sudah melihat banyaknya keluhan atas pelanggaran privasi serta bermunculannya kasus hukum yang dibuka oleh otoritas perlindungan data di seluruh Uni Eropa. Beberapa investigasi menghasilkan denda pada perusahaan teknologi. Beberapa negara non Uni Eropa mulai melirik untuk mengadopsi kerangka kebijakan yang sama terkait perlindungan data. Beberapa perusahaan juga sudah mengutarakan minatnya untuk mulai mengikuti. Ini mengilustrasikan tren terkini yang bisa saja membentuk perlindungan data di seluruh dunia.

Peningkatan tajam keluhan dan kasus perlindungan data di Uni Eropa

Salah satu tujuan utama GDPR adalah memperkuat peraturan perlindungan data Uni Eropa serta memberi lebih banyak wewenang ke otoritas nasional untuk menjalankannya. Laporan pertama dari otoritas di Uni Eropa mengindikasikan keberhasilan kebijakan ini.

Setelah peraturan ini dijalankan, terjadi peningkatan keluhan serta investigasi terkait pelanggaran

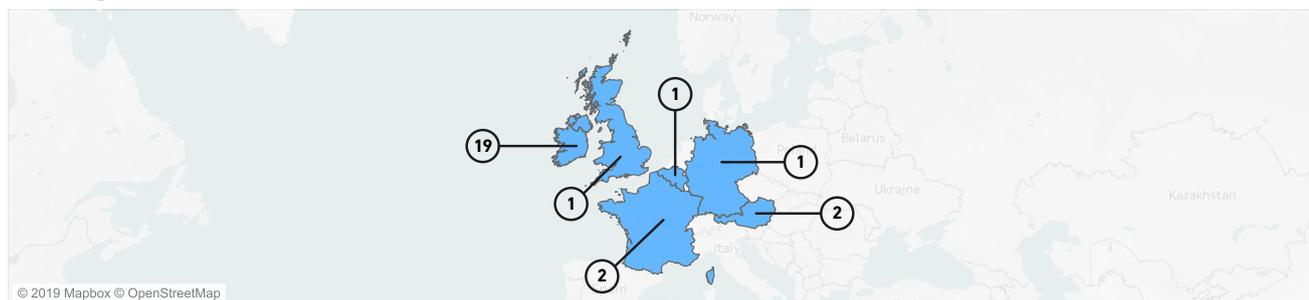
perlindungan data di seluruh negara bagian Uni Eropa. Lebih dari 280.000 kasus diterima oleh otoritas perlindungan data Uni Eropa, sementara itu ada 144.000 keluhan individual yang didaftarkan. Peningkatan jumlah keluhan dan kasus yang diselidiki otoritas nasional juga terlihat dari peningkatan tajam jumlah sumber daya dan staf mereka.

Sejauh ini, denda tidak terlalu besar

Kendati pertumbuhan jumlah investigasi dan pelanggaran data pribadi meningkat, jumlah dan besaran denda (dalam bentuk finansial) tidak terlalu besar sampai saat ini. Di bawah GDPR, penalti yang dikenakan bisa sampai 4% dari total pendapatan setahun. Setelah satu tahun penegakan GDPR dilakukan, total jumlah penalti yang dikumpulkan sekitar €56 juta, tapi satu denda (yang ditujukan ke Google oleh komisi perlindungan data Perancis) berjumlah hampir 90% dari total ini.

Penalti yang cukup rendah ini karena toleransi yang diberikan oleh otoritas nasional untuk sektor bisnis

Investigasi terkait GDPR tahun 2018–2019



Authority	Company	Dates	Status of case	Issue	Hover to read the description and select for additional documents
ICO	Acxiom, Oracle, Criteo, Quantcast, Tapad, Equifax and Experian	09 November 2018	Complaint filed	Lawful basis for processing	Privacy International has filed complaints against seven data brokers (Acxiom, Oracle), ad-tech companies (Criteo, Quantcast, Tapad), and credit referencing agencies (Equifax, Experian) with data protection authorities in France, Ireland, and the UK.
German DPA	Google, Instagram, WhatsApp and Facebook	25 May 2018	Complaint filed	Forced consent	On the first day of GDPR noyb.eu has therefore filed four complaints against Google (Android), Facebook, WhatsApp and Instagram over "forced consent". The GDPR prohibits such forced consent and any form of bundling a service with the requirement to consent (see Article 7(4) GDPR). Consequently access to services can no longer depend on whether a user gives consent to the use of data. On this issue a very clear guideline of the European Commission has been issued.
EDPS	Microsoft	09 April	Investigation opened	Lawful basis for	Investigation into contracts Microsoft holds with its institutions to ensure data

Kunjungi dig.watch/trends/gdpr untuk versi interaktif dari peta ini.

di tahun pertama. Sebab, perusahaan dianggap perlu waktu untuk menyesuaikan kerangka kerja praktik perlindungan data dengan GDPR. Namun, periode transisi ini sudah usai. Misalnya, kepala otoritas perlindungan data di Perancis mengatakan bahwa sanksi akan dijalankan tanpa ragu-ragu mulai sekarang.

Dampak GDPR yang luar biasa ke perusahaan teknologi besar

Raksasa Internet belakangan ini dalam sorotan lantaran banyaknya skandal perlindungan data. Facebook, Google, Apple, Microsoft dan Twitter, di antaranya, saat ini dalam investigasi atas potensi pelanggaran GDPR, serta kemungkinan mendapat denda lebih besar di masa datang. Pada Januari 2019, Google telah mendapatkan sanksi terbesar dari CNIL (€50 juta) untuk pelanggaran GDPR. Walaupun naik banding, Google tetap mendapatkan sanksi karena telah melanggar peraturan terkait iklan bertarget serta persyaratan transparansi di sistem operasi Android mereka.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC), yang telah menjadi otoritas terdepan untuk sebagian besar raksasa Internet, melakukan 19 investigasi untuk beberapa firma karena sebagian besar perusahaan teknologi Amerika mendaftarkan diri untuk memproses data pribadi di Irlandia. Investigasi DPC menarget spesifiknya Facebook dan perusahaan terkait (misalnya WhatsApp dan Instagram) untuk potensi pelanggaran privasi.

Facebook saat ini menghadapi 11 investigasi di Irlandia mulai dari pelanggaran data secara besar-besaran dan pemrosesan data secara hukum sampai ke penjelasan yang transparan ke pengguna. DPC meluncurkan investigasinya paling akhir di Mei 2019 ke Google. Peran unik DPC yang melakukan rangkaian investigasi ke perusahaan teknologi Amerika membuat BBC menjuluki bahwa otoritas itu secara *de facto* sudah menjadi pengawas perlindungan data di Eropa.

Perbedaan implementasi di beragam negara anggota Uni Eropa

Kendati GDPR adalah peraturan yang langsung berlaku di semua negara Uni Eropa, beberapa pasal masih perlu disesuaikan dan diubah menjadi peraturan nasional. Saat ini, tingkat implementasi GDPR tidaklah sejajar di Uni Eropa, karena beberapa negara seperti Portugal, Yunani, dan Slovenia belum mengubah beberapa pasal kunci di GDPR dalam peraturan nasional mereka.

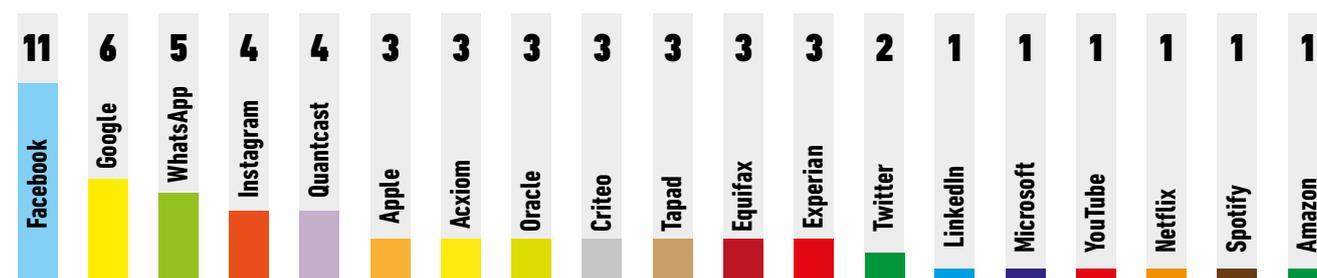
Věra Jourová, Komisioner Eropa untuk Keadilan, Konsumen dan Kesetaraan Gender mengakui lambannya pelaksanaan GDPR dan mendorong semua negara anggota untuk menghormati semangat GDPR 'di akhir mandat Komisi Eropa'. Juga, tidak semua otoritas bisa menjalankan peran dengan baik karena jumlah keluhan yang meningkat luar biasa. Hal ini menunjukkan kurangnya sumber daya dan kemampuan otoritas perlindungan data di beberapa negara.

Dampak GDPR di seluruh dunia

Kendati belum sepenuhnya bisa diimplementasikan di Eropa, GDPR telah memberi dampak cukup penting di negara-negara lain. Di Brazil, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, para pembuat undang-undang maupun pemerintah telah membuat undang-undang baru, peraturan baru dan mempertimbangkan perubahan undang-undang yang lebih sejalan dengan GDPR.

Di Amerika Serikat, debat terkini tentang perlunya peraturan perlindungan data yang baru, muncul karena kerangka yang dibuat oleh GDPR. Kendati awalnya bertentangan keras dengan peraturan privasi yang tegas di Eropa, tapi beberapa perusahaan teknologi besar lambat laun mendukung peraturan nasional yang sejalan dengan GDPR. Tim Cook, CEO Apple misalnya meminta agar Amerika menggunakan GDPR sebagai contoh, sementara Mark Zuckerberg, CEO Facebook juga Sundar Pichai, CEO Google telah menyatakan perlunya perundangan privasi yang lebih komprehensif di tingkat federal.

Investigasi GDPR untuk masing-masing perusahaan



Aktivitas kebijakan di Jenewa: Diskusi di bulan Mei

Sejumlah diskusi kebijakan berlangsung di Jenewa setiap bulan. Pembaruan berikut ini mencakup kegiatan utama di bulan April. Untuk laporan kegiatan, kunjungi [Bagian Past Events di observatorium Digital Watch GIP](#).

Sesi ke-22 Komisi Sains dan Teknologi untuk Pembangunan – 13–17 Mei 2019

Sesi ini membahas dampak perubahan cepat teknologi terhadap pembangunan berkelanjutan dan peran sains, teknologi dan inovasi dalam membangun komunitas yang lenting. Lebih jauh ditekankan pentingnya peran berbagai pengetahuan dan pendidikan untuk membina

mandat UNCTAD dan menandai peluncuran *Laporan Teknologi dan Inovasi 2018: Pemanfaatan Teknologi Terkini untuk Pembangunan Berkelanjutan*.

[Baca laporan kami dari sesi tersebut.](#)

Ulang Tahun ke-50 Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Dunia – 17 Mei 2019

Versi ke-50 dari Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Dunia mengakui usaha ITU sebagai nakhoda dari standar internasional dan mekanisme yang memungkinkan berbagi inovasi. Diskusi fokus pada pentingnya standar melalui contoh kota pintar, keuangan

digital, dan inklusi finansial termasuk melalui contoh standar bersama WHO – ITU untuk pendengaran yang aman dan AI untuk kesehatan (AI4H).

[Baca laporan kegiatan kami.](#)

Sidang Kesehatan Dunia ke-72 – 20–28 Mei 2019

Dalam sidang ke-72, WHO mengadopsi revisi ke-11 dari International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), yang mengakui gaming disorder (kecanduan gim) sebagai kondisi medis. Kondisi ini didefinisikan sebagai 'sebuah pola perilaku bermain ("permainan-digital" atau "permainan-video")

ditandai dengan kontrol yang terganggu atas permainan, naiknya prioritas untuk bermain atas aktivitas lain sedemikian sehingga permainan lebih diutamakan dibanding minat lain dan aktivitas harian, dan berlanjutnya atau meningkatnya permainan walaupun terjadi konsekuensi negatif.'

Pertemuan Puncak Global AI 4 Good – 28–31 Mei 2019

Pertemuan puncak diadakan dengan tema 'Mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' dan mendiskusikan penggunaan praktis dari AI. Mengakui usaha beberapa negara yang telah atau sedang mengembangkan strategi nasional AI, diskusi fokus pada aspek pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi praktik saat ini, ketiadaan norma dan penyesuaian yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi AI dalam pembangunan berkelanjutan.

[Baca laporan kami.](#)



Negotiating Internet Governance, publikasi baru oleh Roxana Radu, diluncurkan pada 28 Mei di Jenewa. Buku ini menyajikan ikhtisar komprehensif dari evolusi mekanisme tata kelola Internet, dari masa awal jaringan hingga isu kebijakan digital masa kini.

Untuk agenda di Jenewa

Juni adalah bulan sibuk untuk mendiskusikan kebijakan digital di Jenewa. Halaman ini menjelaskan singkat beberapa kegiatan selama satu bulan di kota Jenewa.

10–20 JUNI DEWAN ITU 2019

Dalam pertemuan tahunan 2019, Dewan ITU akan mengkaji dan mendiskusikan kerja yang sudah dan akan dilakukan oleh organisasi-organisasi dalam ITU, seperti implementasi dari dokumen keluaran World Summit on the Information Society. Laporan atas aktivitas ITU terkait resolusi yang ada hubungannya dengan isu Internet juga akan didiskusikan.

17 JUNI Jenewa meluncurkan laporan dari Panel Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB untuk Kerjasama Digital

Laporan dari panel akan diluncurkan di New York pada 10 Juni (lihat halaman 12), kemudian akan kembali dilansir di Kantor PBB di Jenewa, seminggu setelahnya. Anggota Panel, Nanjira Sambuli dan Cathy Mulligan, akan memberikan ringkasan laporan lalu mendiskusikannya bersama pemangku kepentingan bagaimana cara menindaklanjuti rekomendasi.

24 JUNI – 12 JULI Sesi 41 – Dewan Hak Asasi Manusia – PBB

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mendiskusikan hal terkait promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Hak atas kebebasan berekspresi, hak minoritas, kekerasan atas perempuan, hak untuk pendidikan, hak untuk berkumpul dan berasosiasi termasuk dalam agenda. Geneva Internet Platform akan melaporkan langsung dari sesi utama dan tambahan yang terkait dengan hak asasi manusia secara daring.

Juni

1



2

10–21 JUNI Sesi 108 dari Konferensi Tenaga Kerja Internasional

Konferensi tahun ini menandai 100 tahun International Labour Organization. Konferensi ini akan mengikutsertakan debat tematik terkait standar tenaga kerja dan kerja masa depan. Laporan dari Komisi untuk Kerja Masa Depan yang diluncurkan awal tahun ini juga akan dibahas dalam pertemuan.

3



20 JUNI Konferensi Hukum dan Kebijakan Keamanan Siber Jenewa

Edisi kedua dari konferensi akan mendiskusikan tanggung jawab hukum atas pelanggaran keamanan siber dan serangan siber, keamanan siber dalam era data raksasa, mesin pembelajar dan AI, serta tanggung jawab hukum serangan siber berbasis AI. Acara ini diselenggarakan oleh University of Geneva dan Hebrew University di Yerusalem.

4

5

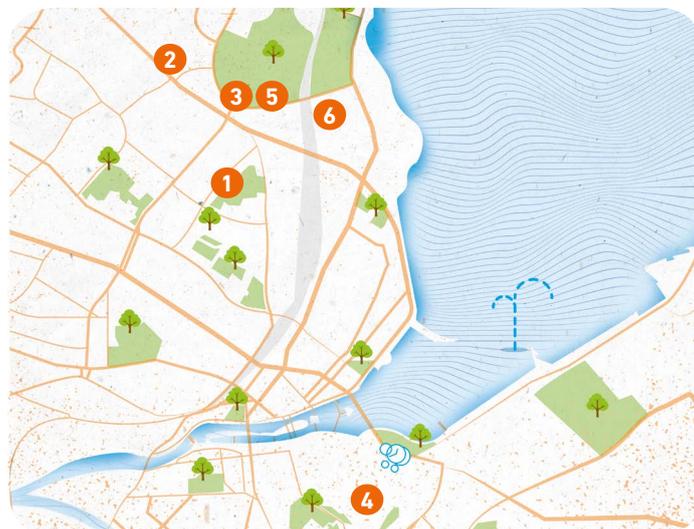


24 JUNI Membongkar laporan Panel Tingkat Tinggi: Kontribusi dari Jenewa

Geneva Internet Platform dan mitranya akan mengadakan diskusi para ahli terkait laporan Panel Tingkat Tinggi untuk Kerja Sama Digital. Acara ini akan mengawali diskusi global terkait rekomendasi panel serta membongkar laporan itu, serta fokus di beberapa area serta kontribusi Jenewa termasuk implementasinya.

6

Juli



Kegiatan Kebijakan Digital Global Utama di Juni

Kami melihat ke depan pada kalender kebijakan digital untuk menyoroti diskusi global utama yang akan diadakan beberapa minggu ke depan. Beberapa di antaranya, observatorium akan menyediakan laporan dari sesi individu, dan laporan final berisi ringkasan semua diskusi.

5-7 JUNI

Konsultasi Terbuka Ketiga dan Rapat MAG – IGF 2019 (Berlin, Jerman) [🔗](#)

Komunitas dan Kelompok Penasehat Pemangku Kepentingan Majemuk (MAG) Internet Governance Forum (IGF) akan bertemu untuk rapat tatap muka menjelang IGF 2019; meneruskan persiapan untuk IGF ke-14 di (Berlin, November 2019) sekaligus mencatat perkembangan kegiatan antar sesi.

11-14 JUNI

RightsCon 2019 (Tunis, Tunisia) [🔗](#)

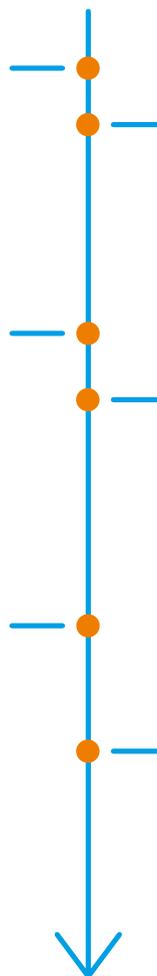
Dilaksanakan oleh AccessNow, RightsCon 2019 membahas topik dampak teknologi untuk masyarakat dan hak asasi manusia. Konferensi ini menghadirkan 17 tema, seperti Kecerdasan Buatan dan Akuntabilitas Otomatisasi serta Algoritma, Melawan Pelecehan Daring dan Ujaran Kebencian serta Kekerasan Ekstrem, dan Membuat Model untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

19-20 JUNI

EuroDIG 2019 (Den Haag, Belanda) [🔗](#)

Berada dalam tema 'Kerja sama – sebuah tindakan tepat', EuroDIG 2019 membahas isu seperti akses dan literasi, perkembangan ekosistem tata kelola Internet, hak asasi manusia, isu inovasi dan ekonomi, media dan isinya, keamanan dan kejahatan, serta isu teknis dan operasional. Geneva Internet Platform adalah salah satu mitra institusional dari EuroDIG sehingga laporan dari masing-masing sesi akan tersedia di observatorium GIP Digital Watch.

Juni



10 JUNI

Peluncuran Laporan Panel Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Digital (New York, Amerika Serikat) [🔗](#)

Salah satu mandat panel ini adalah merekomendasikan perbaikan atas arsitektur kebijakan digital saat ini. Laporan Panel diharapkan bisa mengidentifikasi kesenjangan dan mengajukan 3 model termasuk fungsinya. Laporan itu akan diberikan ke Sekretaris Jenderal PBB saat acara di New York pada 10 Juni dan dilanjutkan di Jenewa satu minggu setelahnya.

13-14 JUNI

Digital Assembly 2019 (Bukares, Rumania) [🔗](#)

Diorganisasi bersama antara Komisi Eropa dengan Dewan Presidensi Rumania di Uni Eropa, pertemuan ini akan membawa semua pemangku kepentingan Eropa untuk secara bersama mendiskusikan status satu pasar digital UE dan tukar pandangan soal kebijakan digital mendatang. Pertemuan dua hari ini terdiri dari empat sesi pleno yaitu Planet Digital 4, Kepemimpinan Digital 4, Kerja Digital 4 dan Komunitas Digital 4, yang semuanya mendiskusikan dampak teknologi digital terhadap masyarakat dan ekonomi.

24-27 JUNI

ICANN65 (Marrakech, Maroko) [🔗](#)

Dicanangkan sebagai Forum Kebijakan, Pertemuan ke-65 dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) akan fokus pada isu penting yaitu organisasi pendukung serta komite penasehat ICANN. Diskusi akan diteruskan terkait rekomendasi kebijakan untuk prosedur nama domain di bagian teratas (gTLDs). Privasi dan perlindungan data, penerimaan secara universal dan model pemangku kepentingan majemuk di ICANN juga akan menjadi topik yang didiskusikan.

Juli

Edisi Ini

Edisi 40 buletin *Digital Watch*, diterbitkan pada 7 Juni 2019 oleh Geneva Internet Platform (GIP) dan DiploFoundation | Kontributor: Cedric Amon, Stephanie Borg Psaila (editor), Andrijana Gavrilović, Marco Lotti, Clement Perarnaud, Natasa Perucica, Vladimir Radunović, and Sorina Teleanu | Penerjemah ke Bahasa Indonesia: Shita Laksmi, Oni Budipramono, Anton Muhajir | Desain: Viktor Mijatović, Aleksandar Nedeljkov, and Mina Mudrić, Diplo's CreativeLab. | More digital policy updates available on <https://dig.watch>

Perdalam dengan lebih banyak sumber

Ketika Anda melihat ikon [🔗](#) klik ikon tersebut untuk mengakses sumbernya atau sumber-sumber lain.

Sampul

GDPR: Setelah setahun berjalan. Kredit: Vladimir Veljasević

© DiploFoundation (2019) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

